

Implementasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara Pada Dispora Sumsel dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2021

Lucia Weny Ramdiastuti¹⁾, Husni Thamrin²⁾, Nengyanti³⁾

^{1, 2, 3}, Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
[Pascasarjana MAP jl. Padang Selasa Palembang]
Email Koresponden : nengyanti@fisip.unsri.ac.id

ABSTRACT

Based on Law Number 40 of 2009 concerning Youth, the youth category is 16 to 30 years old. In the 2021 BPS, the number of youths in South Sumatra reached 359,151. Youth development is carried out in order to improve the spirit of leadership, entrepreneurship, and youth pioneering so that, in the end, it can produce advanced youth, namely youth with character, capacity, and competitiveness (Heri, 2015). The purpose of this research is to explain the Implementation of the Inter-Country Youth Exchange Program at the South Sumatra Dispora related to HR Development as an effort to Build Youth Character in South Sumatra. The results showed that participants who received program benefits admitted that they did not receive optimal benefits. In addition, some parts of the activity did not run optimally because they were only virtual. The beneficiaries also stated that they could not accept the opportunity for internships. This is different from the beneficiaries of the program in the normal era. Another finding is that the PPAN program has not been optimally socialized in all districts and cities. A letter of notification regarding the PPAN program from the Ministry of Youth and Sports addressed to the Provincial Dispora, which was then forwarded to the district or city Dispora regarding the selection of the PPAN program, did not reach the sub-district, village, or kelurahan. Because the district or city Dispora has not optimally escorted it to the sub-districts because there is no socialization budget yet.

Keywords : Implementation, Student Exchange, HR Development

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan kategori pemuda adalah usia 16 sampai 30 tahun. Dalam BPS tahun 2021 jumlah pemuda di Sumatera Selatan mencapai 359.151 pemuda. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada akhirnya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing (Heri, 2015). Tujuan di laksanakan nya penelitian ini yaitu menjelaskan Implementasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara pada Dispora Sumsel terkait Pengembangan SDM sebagai upaya Membangun Karakter Pemuda di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan peserta yang menerima manfaat program mengaku tidak mendapatkan benefit secara optimal. Seperti dikatakan penerima program PPAN yang seharusnya berangkat ke Australia yaitu Saudara Mohamad Hafdz Al Furqon. Kendala yang dihadapi selama proses pertukaran pemuda 2 bulan adalah sinyal yang tidak stabil. Selain itu beberapa bagian kegiatan tidak berjalan maksimal karena hanya melalui virtual. Penerima manfaat juga menyatakan tidak dapat menerima kesempatan untuk magang, Ini berbeda dari penerima program pada era normal. Temuan lain adalah Program PPAN belum tersosialisasi sampai ke seluruh kabupaten/kota secara optimal. Surat pemberitahuan tentang program PPAN dari Kemempora yang ditujukan kepada Dispora Provinsi yang kemudian diteruskan kepada Dispora kabupaten/kota perihal seleksi program PPAN tidak sampai ke kecamatan/desa/kelurahan. Karena Dispora kabupaten/kota belum mengawal secara optimal sampai ke kecamatan disebabkan belum ada anggaran sosialisasi.

Kata Kunci : Implementasi, Pertukaran Pelajar, Pengembangan SDM

1. Pendahuluan

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan yang semakin besar terkait dengan pembentukan karakter dan identitas generasi muda (Usnan, 2021). Dalam menghadapi bonus demografi 2020-2035 persaingan pemuda semakin meningkat. Karena itu penting bagi remaja untuk memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan ke dalam aspek kegiatan publik dalam konteks jiwa kepeloporan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan pemuda sebagai kader penerus bangsa dan negara dalam rangka pembangunan nasional nantinya. Dalam konteks ini, pemerintah dapat memberikan dukungan melalui berbagai inisiatif, seperti menyelenggarakan program pelatihan keterampilan kepemudaan, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan nilai-nilai patriotisme serta budi pekerti yang kuat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda dengan bekal yang memadai untuk mencapai tujuan mereka di masa depan (Januarharyono, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan kategori pemuda adalah usia 16 sampai 30 tahun. Dalam BPS tahun 2021 jumlah pemuda di Sumatera Selatan mencapai 359.151 pemuda. Apabila seluruh pemuda di Sumatera Selatan ini dapat diberdayakan dengan baik tentunya akan sangat membantu berkontribusi dalam memajukan Sumatera Selatan. Dalam konteks ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah mulai memfasilitasi generasi muda dengan memainkan peran penting sebagai penyelenggara kegiatan pengembangan komunitas organisasi. Ini dilakukan melalui program-program seperti pertukaran pemuda lintas negara. Melalui upaya ini, strategi pengembangan pemuda di Sumatera Selatan sedang diupayakan.

Segala hal yang berhubungan dengan upaya membangun di sektor kepemudaan dan olahraga, merupakan tugas dan kewajiban dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memfasilitasi, selaku perpanjangan tangan Pemerintahan. Hal ini sendiri tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2009 yang secara garis besar menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, merupakan tugas pemerintah.

Sumber daya manusia dalam hal ini pemuda, tidak terlepas dari komponen pendidikan formal. Sejalan dengan hal tersebut Indeks Pembangunan Pemuda juga mengukur domain pendidikan dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar untuk Sekolah Menengah dan Angka Partisipasi Kasar untuk Perguruan Tinggi. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah mengindikasikan persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umur 13-18 tahun, sementara Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi mengindikasikan persentase mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D1-S3) dalam kelompok umur 19-24 tahun. APK Sekolah Menengah hampir selalu mengalami tren kenaikan dari tahun 2011 hingga 2019 yang mencapai 87.63%, untuk APK Perguruan Tinggi data dari tahun 2015 hingga 2019 (32.04%) selalu mengalami kenaikan. Target APK Sekolah Menengah

untuk tahun 2020 ialah 88.64% dan target APK Perguruan Tinggi tahun 2020 ialah 34.00%. Secara umum, pendidikan tertinggi pemuda didominasi oleh pemuda yang tamat SMA/ sederajat sebesar 37.59% dan tamat SMP/ sederajat sebesar 34.87%. Kurang dari 10% pemuda saja yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi 9.98%.

[Pencapaian Kinerja Pelayanan DISPORA]



Gambar 1.1 Grafik Capaian Kinerja Pelayanan Dispora
Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 –2023

Berdasarkan data di atas mempersentasikan bahwa Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) mengalami dinamika setiap tahun, terbukti bahwa data tiga tahun belakang pencapaian target PPAN tidak mencapai target.

Tahapan selanjutnya adalah pembahasan anggaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menentukan pagu anggaran setiap program kegiatan. DPRD Provinsi kemudian akan membahas kembali program kegiatan dan anggaran tersebut hingga pada akhirnya dapat masuk dalam APBD Provinsi. Setelah terbitnya Perda dan Pergub tentang APBD selanjutnya adalah penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) program kegiatan pada masing-masing Dinas. DPA ini merupakan dasar untuk melaksanakan Program Kegiatan PPAN pada tahun berkenaan.

Program Pertukaran Pemuda Antar Negara merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan SDM dalam hal ini pemuda dari berbagai aspek, seperti keterampilan berinteraksi, bekerjasama, kemampuan bahasa, mengasah kreativitas dan berinovasi mengembangkan kemampuan diri. Sebagai gambaran tahun 2021 di Sumatera Selatan terdapat 230 orang yang mengikuti seleksi. Kemudian dilakukan penyaringan lagi sehingga menjadi 100 orang untuk mengikuti tes tertulis, 50 orang lulus untuk mengikuti tahapan tes wawancara, dan terakhir 16 orang yang lulus untuk mengikuti karantina.

Peserta pertukaran yang berasal dari Sumatera Selatan dalam Program PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) ini, diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam memperkenalkan keberagaman budaya, kearifan local, serta keindahan alam Sumatera Selatan ke kancah dunia. Sumber daya alam yang indah, budaya yang kaya akan keberagaman, serta masyarakat yang ramah inilah yang akan menjadi daya tarik utama agar wisatawan dunia untuk melihat Sumatera Selatan sebagai suatu destinasi wisata.

Implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu organization, interpretation, and application (Novie R, 2016).

Implementasi kebijakan yang menjadi aktivitas pertama organisasi dalam pelaksanaan kebijakan untuk membentuk atau penataan kembali sumber daya sehingga metode tersebut dijadikan program yang berjalan, kedua interpretasi para pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat agar diterima dan dilaksanakan, ketiga aplikasi atau penerapan untuk pelaksanaan kebijakan yang mencakup ketentuan yang rutin dari pelayanan, pembayaran yang disesuaikan dengan tujuan dari program kebijakan publik. Dalam praktiknya, Implementasi dari suatu program ataupun kebijakan, dapat dikatakan baik apabila dilakukan sesuai dengan ukuran atau takaran yang telah diputuskan sebelumnya (.Wafa, A., & Angin, R., 2024).

David C. Korten dalam Suswanta (2019) mengemukakan sebuah model implementasi program yang menitikberatkan pada konsistensi antara tiga elemen kunci dalam penyelenggaraan program, yakni esensi program, pelaksana program, dan masyarakat yang menjadi sasaran program. Sebuah program akan sukses apabila memiliki kecocokan dari tiga unsur di atas sebagai berikut:

- a. Kesesuaian program dengan manfaat yang ditawarkan terhadap kelompok sasaran.
- b. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana terhadap tugas yang dibutuhkan oleh program dan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Kesesuaian kelompok penerima manfaat dengan organisasi pelaksana terhadap kondisi yang sudah diputuskan oleh organisasi yang telah diputuskan dengan organisasi yang dapat memperoleh apa yang telah dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Dari teori atau model implementasi program di atas dapat disimpulkan bahwa model implementasi tepat digunakan dalam penelitian Implementasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara pada Dispora Sumsel terkait Pengembangan sumber daya manusia dan penerapan program oleh Dispora Sumsel. Model Implementasi program dapat membantu merencanakan keputusan dan menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Implementasi program dengan konteks memberikan gambaran terhadap latar belakang program, mengukur kebutuhan program, menentukan tujuan, menentukan sasaran program yang akan dicapai.

Kementerian RI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyusun rencana Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) sebagai suatu bentuk kebijakan kesadaran pemuda yang pada dasarnya mengedepankan karakter pemuda pendirian Indonesia meliputi keimanan dan ketakwaan, akhlak berbangsa, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, tanggung jawab, kepemilikan identitas kader, kemandirian dan nasionalisme yang tinggi (Febriansyah, 2020).

Dalam pelaksanaannya mereka akan mendapatkan keterampilan kursus antarbudaya.

Kemudian interaksi di antara mereka tidak terbatas pada satu atau dua budaya, tetapi budaya yang lebih heterogen membuatnya harus bertemu dan menghadapi banyak hal yang mungkin belum mereka prediksi sebelumnya (Stefanie & Harijono, 2016). Di sinilah peran pemerintah yang selalu memberikan ruang yang positif bagi generasi muda.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dispora Sumatra Selatan. Sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dalam tahap pengumpulan, perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan kegiatan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara pada Dispora Sumsel terkait Pengembangan SDM".

2. Pembahasan

2.1 Implementasi Program PPAN Dispora Sumatera Selatan

Sebuah penelitian yang mengulas tentang "Implementasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara di Dispora Sumsel untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia" menggunakan konsep implementasi program yang diajukan oleh David C. Korten dalam Andani et al., (2019) menyatakan bahwa kesuksesan suatu program tergantung pada keselarasan dari tiga elemen kunci dalam implementasinya: pertama, konsistensi program dan pemanfaatan, yang menekankan pada kesesuaian antara apa yang disediakan oleh program dan kebutuhan kelompok sasaran; kedua, keselarasan antara program dan lembaga pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi pelaksana; dan ketiga, integrasi antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana, yang fokus pada kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan organisasi untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengeksplorasi segala data yang digunakan pada riset ini, peneliti mewawancarai sumber-sumber utama yaitu beberapa informan yang termasuk dalam kategori implementor. Wawancara dilakukan pada tanggal 06-09 Januari 2023. Kemudian ada wawancara tambahan untuk memperdalam jawaban pada 30 Maret – 1 April 2023. Adapun yang menjadi informan biasa pada penelitian ini yaitu :

1. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dispora Prov. Sumsel. Ellin Zahara, S.E., M.Si sebagai informan 1.
2. Kasi Tenaga SDP, Iptek & Imtaq Pemuda. Novenda, sebagai informan 2.
3. Kasi kepemimpinan kepeloporan pemuda. Hunce J Hamzah, sebagai informan 3.
4. Kabid pengembangan Pemuda Dispora prov.sumsel. H. Kaprawi, sebagai informan 4.
5. .Kasi peningkatan kreativitas pemud. Harry Kusuma, sebagai informan 5.
6. Kasi kewirausahaan dan infrastruktur. Sri Gunarto, sebagai informan 6.

7. Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Sekretariat Dispora. Abriyadi, sebagai informan 7.
8. Swasta. Dwiyani Dharma Putri, sebagai informan 8.
9. Kasi Peningkatan wawasan dan Kapasitas Pemuda. Reza Fahlevi, sebagai informan 10.
10. Para alumni PCMI (10 orang)
11. Sementara bertindak sebagai key informan adalah Kadispora Sumsel 2015-2022 Akhmad Yusuf Wibowo.

Setelah suksesnya perolehan data, data kemudian dianalisis hingga mampu ditariknya sebuah kesimpulan. Data dan analisis hasil pengkajian riset ini berpatokan pada model yang diungkapkan oleh David C. Korten.

Pada indikator ini berkaitan dengan konsistensi program dan pemanfaatan, yaitu kecocokan antara apa yang telah disediakan program dengan kebutuhan kelompok sasaran (penerima).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari segi pemahaman informan terhadap terkait Program Pertukaran Pemuda Antar Negara ini sudah sangat memahami maksud dan tujuan diadakannya program tersebut. Dalam wawancara di atas disebutkan bahwa program ini merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan Kementerian negara-negara terkait, yang bertujuan mengembangkan SDM. Kerjasama antara negara melalui pertukaran pemuda juga memiliki manfaat yang besar dalam membangun karakter pemuda dengan adanya nilai positif dari negara yang ditempati maka kesempatan menimba ilmu dan belajar dari negara lain juga akan membuka wawasan pemuda Sumatera Selatan. Setiap program pertukaran pemuda sudah tentu memiliki banyak nilai positif terhadap pemuda yang mengikutinya bukan hanya untuk individu bahkan pemuda yang mengikuti program pertukaran pemuda ini juga membawa nama baik daerah maupun negara. Pemuda akan banyak berinteraksi dengan bahasa dan budaya negara lain, sehingga pemuda akan membantu mempromosikan budaya daerah atau negaranya sendiri.

2.2 Program dengan Kelompok Sasaran

Keselarasannya antara program dan organisasi implementer, yaitu kesesuaian antar tugas kompetensi yang dibutuhkan oleh program badan pelaksana. Pada indikator ini berkaitan dengan keselarasannya antara program dan organisasi implementer, yaitu kesesuaian antar tugas kompetensi yang dibutuhkan oleh program badan pelaksana. Peneliti juga memberikan pertanyaan, bagaimana cara dinas dalam menyampaikan atau memberikan informasi mengenai adanya program tersebut.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor dalam memberikan pemahaman mengenai Program Pertukaran Pelajar Antar Negara ini melalui sosialisasi secara langsung, lewat media sosial, website dan bekerjasama dengan alumni PCMI. Hal ini bertujuan agar seluruh generasi muda Indonesia khususnya di Sumatera Selatan dapat menjadi duta muda terbaik dari

masing-masing wilayah yang memiliki potensi pengetahuan dan wawasan yang luas. Teknologi informasi pada program pertukaran pemuda khususnya Sumatera Selatan berperan sebagai media informasi terkait program pertukaran pemuda, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna internet.

Metode sosialisasi sangat tepat untuk menyebarkan informasi karena platform media sosial sebagai media yang sering kita jumpai di beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya. Media sosial saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari yang sadar mencari hiburan sampai mencari informasi. Menyadari akan hal tersebut saat ini banyak instansi pemerintah yang sudah aktif terjun ke media sosial agar menjangkau masyarakat lebih luas maka dari itu media sosial sarana sosialisasi yang efektif dan efisien bagi instansi pemerintah.

Indikator program dengan kelompok sasaran menjelaskan bahwa konsistensi program dan pemanfaatan, yaitu kecocokan antara apa yang telah disediakan program dengan kebutuhan sasaran (penerima).

Selarasan antar informasi yang diberikan oleh pihak implementor kepada pihak sasaran secara garis besar melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dispora. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Provinsi Sumsel dilakukan melalui website, untuk informasi dari media sosial paling sering dilakukan oleh kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda.

Program Pertukaran Pemuda Antar Negara ini melibatkan koordinasi dengan alumni PCMI dengan tujuan membuka gerbang bagi pemuda/i Indonesia untuk lebih memahami adat, seni dan budaya negara yang menjadi destinasi, bertukar pengetahuan dan melaksanakan aktivitas bersama di negara lain akan menumbuhkan saling memahami, menghormati, serta tenggang rasa di kalangan generasi muda. Disamping itu, memperbanyak pengalaman dan kapabilitas selesai menjadi bagian dari program tersebut.

Pertukaran pemuda diharapkan memang memberikan pengalaman baru, unik dan berbeda sekaligus untuk memperluas relasi. Pemanfaatan pertukaran pemuda selanjutnya adalah memperluas jaringan.

2.3 Kapabilitas Implementasi Organisasi

Interaksi kerjasama yang dilakukan dengan alumni (PCMI) paling besar dilakukan oleh Kadispora Sumsel 2015-2022 dengan nilai 49 persen. Relevansi tersebut bertujuan untuk memupuk jiwa kepemudaan untuk mempunyai kompetensi yang pada akhirnya dapat menambah kegiatan kepemudaan.

Upaya optimal yang telah dilaksanakan meski di tengah keterbatasan anggaran namun hasil yang dicapai tetap maksimal. Membuat aturan dan prosedur yang jelas, ketat, transparan dalam tahap seleksi yang sangat kompetitif. Rivalitas antar peserta seleksi membuat suasana dan ambience persaingan sehat tercipta sehingga

peserta seleksi menempatkan kemampuan maksimalnya dapat unggul dan mendapatkan nilai terbaik. Dengan demikian dapat terpilih menjadi delegasi Provinsi Sumatera Selatan pada ajang PPAN.

Namun pada sisi lain pelaksanaan program ini mengalami kendala. Khususnya pada soal ketersediaan anggaran. Tahun anggaran 2019 Dispora mengusulkan anggaran untuk Bidang Pemuda dan Olahraga sebesar 0,02 persen dari APBD berkisar Rp 50 Miliar – Rp 70 Miliar, pada kenyataannya realisasi anggaran tidak stabil. Jadi semestinya untuk memaksimalkan program dengan implementasi perlu kebijakan anggaran yang berpihak pada visi dan misi Gubernur Sumsel pada bidang pemuda dan olahraga. (cantumkan link YT Komisi X dengan Kadispora Sumsel tentang anggaran olahraga).

Seleksi peserta merupakan tahap penting dalam proses penyeleksian Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) di Provinsi Sumatera Selatan untuk memilih delegasi terbaik yang akan mewakili program PPAN. Komponen seleksi peserta, termasuk panitia penyingkiran, proses penyingkiran, dan lokasi telah ditentukan. Panitia penyingkiran terdiri atas para pakar dari beragam sektor yang berkolaborasi dengan pihak pelaksana untuk menyelaraskan program dengan kepentingan spesifik, yang mencakup Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, Bagian Peningkatan Kreativitas Pemuda, Bagian Kewirausahaan dan Infrastruktur, serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Keagamaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemuda. Program pertukaran pemuda ini diselenggarakan untuk mempromosikan perdamaian melalui studi kebudayaan, dan kehadiran program ini diharapkan dapat menjadi salah satu peluang peningkatan pengetahuan bagi generasi muda.

2.4 Kelompok Penerima Manfaat dan Organisasi Pelaksana

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, selaku representasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di tingkat daerah, memiliki peran yang penting dalam menggandeng generasi muda. Hal tersebut diwujudkan oleh Dispora Sumsel yang berkolaborasi dengan Pesatuan Pelajar Indonesia (PCMI) Sumsel melalui inisiasi pembimbingan organisasi kepemudaan. Dispora Provinsi Sumsel telah mengimplementasikan program PPAN secara efektif dengan menguasai berbagai potensi. Program pertukaran pemuda merupakan sebuah program yang memberikan kesempatan bagi pemuda untuk merasakan pendidikan negara lain dalam jangka waktu tertentu menjadi salah satu peserta program pertukaran pemuda sudah menjadi impian bagi sebagian besar kaum pemuda, mengikuti program pertukaran pemuda juga memiliki segudang manfaat yang tentunya dapat membantu untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan diri. Selain itu, mempelajari budaya lain dapat memberikan beberapa manfaat berupa memperluas pengetahuan, wawasan tentang budaya lain dan meningkatkan toleransi terhadap budaya ragam budaya yang ada di dunia.

2.5 Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program

Kapabilitas organisasi Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Provinsi Sumsel memupuk kolaborasi dengan alumni (PCMI) dengan maksud menumbuhkan jiwa kepemudaan guna dapat menambah kompetensi, yang pada akhirnya dapat memajukan kegiatan kepemudaan yang mana akan menstimulasi pembangunan secara keseluruhan. Pada indikator terakhir kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana dimaksudkan pelaksana dengan kesesuaian kondisi yang telah diputuskan dengan organisasi yang dilakukan oleh Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda dengan cara mengadakan sistem penyingkiran partisipan PPAN di Sumsel guna memperoleh perwakilan terbaiknya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisa data di lapangan yang diuji dengan teori David C Korten ada beberapa hal. Pertama, anggaran tidak konsisten. Pada tahun 2019 besar anggaran untuk program PPAN ini Rp 50.000.000,- yang bersumber pada APBD. Tahun 2020, program PPAN ditiadakan karena dunia sedang dilanda bencana Covid-10. Tahun 2021 anggaran yang semula sebesar Rp 175.000.000,- difocusing masih dengan alasan Covid-19 menjadi Rp 100.000.000,- Program tetap bisa terlaksana namun semua dilaksanakan secara virtual dan hybrid. Mulai dari proses seleksi, wawancara dan pelaksanaan program setelah terpilihnya peserta. Hasil penelitian menunjukkan peserta yang menerima manfaat program mengaku tidak mendapatkan benefit secara optimal. Seperti dikatakan penerima program PPAN yang seharusnya berangkat ke Australia yaitu Saudara Mohamad Hafdz Al Furqon.

Kendala yang dihadapi selama proses pertukaran pemuda 2 bulan adalah sinyal yang tidak stabil. Selain itu beberapa bagian kegiatan tidak berjalan maksimal karena hanya melalui virtual. Penerima manfaat juga menyatakan tidak dapat menerima kesempatan untuk magang, ini berbeda dari penerima program pada era normal. Peserta lain yaitu Saudara Shania Nursiah Hasri yang lulus untuk Program Pertukaran Pemuda ke Jepang (SSEYAP) dalam wawancara mendalam menyatakan bahwa kegiatan tidak leluasa seperti kegiatan peer learning sessions. Yaitu pertukaran pengalaman dari setiap negara ASEAN untuk saling unjuk kebudayaan pada malam pentas budaya. Selain itu, ruang untuk bisa lebih maksimal juga terbatas, kendala jaringan internet yang kadang tidak baik, dan ruang komunikasi sangat terbatas. Peserta harus menunggu giliran karena keterbatasan waktu. Selain itu, peserta tidak mendapat suasana yang sesungguhnya yaitu berada di atas kapal.

Temuan lain adalah Program PPAN belum tersosialisasi sampai ke seluruh kabupaten/kota secara optimal. Surat pemberitahuan tentang program PPAN dari Kemenpora yang ditujukan kepada Dispora Provinsi yang kemudian diteruskan kepada Dispora kabupaten/kota perihal seleksi program PPAN tidak sampai ke kecamatan/desa/kelurahan. Karena Dispora

kabupaten/kota belum mengawal secara optimal sampai ke kecamatan disebabkan belum ada anggaran sosialisasi. Dari temuan-temuan tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian bahwa ada kekurangsesuaian antara program dan manfaat yang ditawarkan program dengan kelompok sasaran. Yakni merujuk pada jawaban key informan tentang ketidakstabilan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan politik anggaran.

Temuan hasil penelitian juga mampu menjawab poin tentang ada kekurangsesuaian antara kelompok penerima manfaat (peserta PAPAN) dan organisasi pelaksana (Dispora) dengan kesesuaian antara kondisi yang telah diputuskan (Covid-19) dengan organisasi yang dapat memperoleh apa yang telah dilakukan oleh kelompok sasaran program (Dispora). Temuan ini hendak mengatakan bahwa kondisi bencana Covid-19 membuat pelaksanaan tahun 2020 ditiadakan. Sedangkan pelaksanaan tahun 2021 dilakukan secara virtual, yakni tidak ada keberangkatan peserta ke negara tempat program berlangsung. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ini berakibat pada kurang optimalnya manfaat bagi peserta.

Meskipun dihadapkan pada situasi dan dinamika seperti disebutkan di atas Dispora Sumsel dapat melaksanakan kegiatan dengan proses seleksi ketat, jujur, independen. Dan pada sisi lain memunculkan kreativitas berupaya kolaborasi dengan beberapa lembaga agar program ini berjalan maksimal dan sesuai standar. Dispora Sumsel sebagai organisasi pelaksana program Kemenpora juga sudah berupaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia melalui program PAPAN. Adapun saran agar program PAPAN ini pada masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik adalah dengan mendorong terjadinya kebijakan politik anggaran. Hendaknya, anggaran mengikuti program atau sumber daya Money Follows Program (MFP) dan Money Follows Function (MFF). Digunakan sebagai pendekatan dalam pengalokasian sumber daya keuangan untuk mendukung program PAPAN. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran tersedia dan dialokasikan secara tepat dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Dan yang dapat mengusulkan ini adalah Kemenpora. Tangan Dispora tidak sampai untuk bisa meminta tambahan budget. Penelitian ini mendorong terjadinya ruang penelitian baru tentang kebijakan politik anggaran bagi keberhasilan sebuah program.

Daftar Pustaka

Ahmad, Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. ... *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 115–124. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/514>

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Ali, P., & Mukti, G. (2012). Rencana Kebijakan Implementasi. 7(September), 1–49.
- AlYahmady, H. H., & Al Abri, S. S. (2013). Using Nvivo for Data Analysis in Qualitative Research. *International Interdisciplinary Journal of Education*, 2(2), 181–186. <https://doi.org/10.12816/0002914>
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Anderson, J. A. (2000). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Arfanisa Fadia Firdausi, Ari Subowo, T. A. D. (2020). EVALUASI PROGRAM PEMUDA PELOPOR DI DINDIKPORA KABUPATEN REMBANG Arfanisa. 1–17.
- Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, F. T. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*.
- Bagus, P. (2016). Program Pertukaran Pemuda AIESEC Indonesia untuk Mempromosikan Budaya Lokal ke Masyarakat Internasional. *Repository.Unair.Ac.Id*, 1–14.
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus (1st ed.)*. Mitra Wacana Media.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dey, I. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203412497>
- Donoso, G. R. (2017). NARRATIVES AND BIOGRAPHICAL APPROACH. USES, SCOPE AND CHALLENGES FOR INTERDISCIPLINARY RESEARCH. In *Enfermería: Cuidados Humanizados (6th ed., pp. 69–76)*. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la salud (Anexo).

- Elih, Y. (20189). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *News.Ge*, 30, <https://news.ge/anakliis-portiaris-qveyenis-momava>.
- Escoe, A. (2001). *The Practical Guide to People-friendly Documentation* (2nd ed.). ASQ Quality Press.
- Febriansyah, A. (2020). Efektivitas Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada Dalam Meningkatkan Aktivitas Kepemudaan Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.52239/jar.v7i1.3072>
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291–295. <https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192>
- Gita, I., & Mulyadi, M. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. *Jurnal Aspirasi*, 10(1), 61–75. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i1.1255>
- Handi, R., Sujianto, & Rusli, Z. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA Rifian Handi, Sujianto dan Zaili Rusli Kampung Keluarga Berencana adalah Berencana sebagai upaya mewujudkan Keluarga Berencana merupakan konsep terpadu program Keluarga Berencana dengan program pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 89–95.
- Heri, J. (2015). Peran Pemuda dalam Pembangunan Politik Hukum di Indonesia. *Nurani*, 15(1), 85–100.
- Hidayah, N. (2013). Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Pencerahan*, 7(1), 35–40. <http://unipost.com/16503/ujian-nasional-dan>
- Hill, L. H. (2007). Thoughts for students considering becoming qualitative researchers. *Qualitative Research Journal*, 7(1), 26–31. <https://doi.org/10.3316/QRJ0701026>
- Januarharyono, Y. (2019). Peran Pemuda Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1), 9.
- Jayayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan pemilihan Umum. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1), 101–107.
- Johnny Saldana. (2011). *Fundamentals of Qualitative Research* (Natasha Beretvas (ed.)). Oxford University Press.
- Jumria, M. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. 7(i), 6.
- Kelly, S. E. (2010). Qualitative Interviewing Techniques and Styles. In I. Bourgeault, R. Dingwall, & R. de Vries (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Methods in Health Research* (1st ed., pp. 1–786). Sage Publications.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2011). KEBIJAKAN PUBLIK DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI. 8, 31–36.
- Lavrakas, P. J., & Roller, M. R. (2015). *Applied qualitative research design: a total quality framework approach*. The Guilford Press.
- Lerrick, B. A. (2022). Model Baru Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Era New Normal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4, 1–10. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.372>
- Lofland, J., Snow, D. A., Anderson, L., & Lofland, L. H. (2006). *Developing Analysis. In Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (4th ed., pp. 195–219). Wadsworth Thomson Learning.
- Mustika, Prabaningrum, K. (2019). HARMONISASI ANTARA ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK. 2, 89.
- Naafs, S., & White, B. (2012). Generasi Antara : Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia *Jurnal Studi Pemuda*, I(2), 89–106. <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32063/19387>
- Ningtyas, M. N. (2019). Literasi Keuangan pada Generasi Milenial. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 13(1), 20–27. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v13i1.111>
- Nordquist, R. (2019). *Documentation in Reports and Research Papers*. Thoughtco. Nugrahani,
- Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Carla A. Green, Wisdom, J. P., Duan, N., &
- Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Ramadhani, P., & Suswanta, S. (2019). Implementation of Government Programs in Facilitating Employment Opportunities for Persons with Disabilities in Special Region of Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.63116>
- Rita, R. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN PEMUDA PELOPOR PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR. 1(September), 111–116.
- Rosabal, E. M. D., Vidal, J. M. D., Vázquez, A. E. G., Martínez, Y. S., Rodríguez, G. R., & Reyes, D. de la C. S. (2018). Presencia de las TIC en las investigaciones sociales. *Revista de Investigación En Tecnologías de La Información*, 6(11), 19–24.

- Rubin, H., & Rubin, I. (2012). Qualitative Interviewing (2nd ed.): The Art of Hearing Data. Qualitative Interviewing (2nd Ed.): The Art of Hearing Data, 95, 469–470.
<https://doi.org/10.4135/9781452226651>
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). Metode Penelitian Survei. LP3ES. Soamole, M., Rorong, A. J., & Rompas, S. (2015). Implementasi Kebijakan Etika Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
- Stefanie, S., & Harijono, K. A. (2016). Keterampilan Berkomunikasi Antara Budaya Pada Peserta Dalam Program Pertukaran Pemuda Internasional. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 15(1), 12–21.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/37>
- Sufiadi, J. (2015). Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin. Reformasi, 5(1), 160–168.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/73%0Ahttps://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/73/73>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 25–36.
<https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Thomas, M. S., & Feng, Y. (2021). Consumer risk perception and trusted sources of food safety information during the COVID-19 pandemic. Food Control, 130, 108279.
<https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108279>
- Usnan. (2021). 17 ref proposal peran pemuda dalam pengelolaan lingkungan3336- 15202-1-PB. 2(1), 87–100.
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 1-14.
- Yulianti, D. (2018). Implementasi Program Kemitraan Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 20(1), 11–21.